

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KABUPATEN/ KOTA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

SATKER BAWASLU D.I. YOGYAKARTA

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2	3	4	5	6	7
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				4.040.163.000	
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				4.040.163.000	Provinsi & Kabupaten/ Kota
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		2	Layanan	168.244.000	
	<b>Indikator KRO :</b>					
	01 Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP		100	%		
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi		1	Layanan	109.820.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan kegiatan SOP 2. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 3. laporan kegiatan sistem penanganan pelanggaran 4. laporan pengelolaan barang dugaan pelanggaran 5. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	5	Laporan	85.355.000	Provinsi
	052 Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. laporan kegiatan SIPS (sistem informasi penyelesaian sengketa) 2. laporan penyusunan dan implementasi SOP 3. laporan sosialisasi perbawaslu terkait bidang sengketa proses 4. laporan semester terkait pembinaan ke provinsi dan kab/kota	4	Laporan	24.465.000	Provinsi
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota		1	Layanan	58.424.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Koordinasi penanganan pelanggaran	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran: 1. Laporan Kegiatan SOP 2. Laporan pembinaan/pendampingan ke kab/kota semesteran 3. laporan kegiatan sistem penanganan pelanggaran 4. laporan pengelolaan barang dugaan pelanggaran 5. laporan penyelenggaraan penanganan pelanggaran	16	Laporan	38.812.000	Kab/Kota
	052 Koordinasi penyelesaian sengketa proses	Jumlah laporan pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses: 1. laporan kegiatan sengketa cepat 2. laporan sosialisasi SIPS ke kecamatan 3. laporan sosialisasi perbawaslu terkait sengketa proses ke kecamatan 4. laporan kegiatan pembinaan per semester bidang sengketa proses ke kecamatan	16	Laporan	19.612.000	Kab/Kota
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga	82.307.000	
	<b>Indikator KRO :</b>					
	01 Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Daerah		
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga	82.307.000	RPJMN
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	82.307.000	Provinsi
BKC	Pemantauan Lembaga			Laporan	796.618.000	
	<b>Indikator KRO :</b>					
	01 Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan		100	%		
001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi		12	Laporan	336.058.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan	176.759.000	Provinsi
	052 Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan	2	Laporan	99.121.000	Provinsi
	053 Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan	-	Provinsi
	054 Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	4	Laporan	47.325.000	Provinsi
	055 Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	1	Laporan	12.853.000	Provinsi

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
			4	5		
1	2	3	Satuan		6	7
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota		48	Laporan	460.560.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
051	Pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan pengawasan pemilu partisipatif	20	Laporan	234.336.000	Kab/Kota
052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi dan koordinasi menghadiri undangan	8	Laporan	123.000.000	Kab/Kota
053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan		Kab/Kota
054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	Jumlah kegiatan pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan: - IDI variabel Hak Memilih & Dipilih (Indikator Nomor 11); - laporan triwulan.	16	Laporan	17.212.000	Kab/Kota
055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	Jumlah fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas (IDI variabel Hak Memilih & Dipilih ,Indikator Nomor 12)	4	Laporan	86.012.000	Kab/Kota
XXXX	<b>PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU</b>					<b>Prioritas Nasional Tahapan Pemilu</b>
QDB	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>		5	Lembaga	2.367.554.000	
	<b>Indikator KRO :</b>					
01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu		5	Daerah		
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		0	Lembaga		
	<b>Komponen Input :</b>					
053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	Jumlah daerah yang melaksanakan rekrutmen pengawas pemilu	0	Daerah		Kab/Kota
005	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi		1	Lembaga	1.037.846.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	82.478.000	Provinsi
052	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	90.368.000	Provinsi
053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan	77.115.000	Provinsi
054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	59.865.000	Provinsi
055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	101.858.000	Provinsi
056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	37.457.000	Provinsi
057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	4	Laporan	588.705.000	Provinsi
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		4	Lembaga	1.329.708.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	Jumlah dokumen perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	4	Laporan	35.300.000	Kab/Kota
052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	Jumlah laporan sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	8	Laporan	146.460.000	Kab/Kota
053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	16	Laporan	41.500.000	Kab/Kota
054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	Jumlah laporan sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	8	Laporan	351.852.000	Kab/Kota
055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	16	Laporan	143.260.000	Kab/Kota
056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	16	Laporan	143.192.000	Kab/Kota
057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	16	Laporan	468.144.000	Kab/Kota
007	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Panwaslu Kecamatan, Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS		0	Lembaga	0	
	<b>Komponen Input :</b>					
051	Honorarium panwaslu kecamatan	Jumlah laporan honorarium panwaslu kecamatan	0	Laporan		Kecamatan
052	Sewa gedung/ peralatan/ meubelair	Jumlah laporan sewa gedung/ peralatan/ meubelair	0	Laporan		Kecamatan
053	Pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	Jumlah laporan pemeliharaan gedung/ meubelair/ peralatan	0	Laporan		Kecamatan
054	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah laporan pelayanan administrasi perkantoran	0	Laporan		Kecamatan
055	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	Jumlah laporan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri undangan	0	Laporan		Kecamatan
XXXX	<b>PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU</b>					<b>Prioritas Nasional Tahapan Pemilu</b>
QDB	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga</b>		5	Lembaga	625.440.000	
	<b>Indikator KRO :</b>					
01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu		5	Daerah		
002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi		1	Lembaga	223.400.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
051	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	53.080.000	Provinsi
052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	54.130.000	Provinsi
053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	56.795.000	Provinsi
054	Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	1	Laporan		Provinsi
055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	59.395.000	Provinsi
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		4	Lembaga	402.040.000	
	<b>Komponen Input :</b>					
051	Publikasi dan dokumentasi	Jumlah laporan Publikasi dan dokumentasi	4	Laporan	86.580.000	Kab/Kota
052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	4	Laporan	110.580.000	Kab/Kota
053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	4	Laporan	101.180.000	Kab/Kota
054	Fasilitasi sentra gakkumdu	Jumlah dokumen penanganan pelanggaran Pemilu yang diproses	4	Laporan		Kab/Kota

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab	
			4	5			
1	2	3	Satuan		6	7	
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	Jumlah laporan Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	4	Laporan	103.700.000	Kab/Kota
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				11.675.954.000		
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				11.675.954.000	Provinsi & Kabupaten/ Kota	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal			6	Layanan	10.362.216.000	
	Indikator KRO :						
	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		
956	Layanan BMN			1	Layanan	89.020.000	
	Komponen Input :						
	051	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pembinaan dan pengelolaan BMN yang sesuai dengan ketentuan	1	Laporan	49.784.000	Provinsi
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengelolaan BMN	Jumlah Kab/Kota	Laporan	39.236.000	Kab/Kota
957	Layanan Hukum			1	Layanan	67.730.000	
	Komponen Input :						
	051	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	18.505.000	Provinsi
	052	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah diseminasi produk hukum yang diselenggarakan sesuai SOP	1	Laporan	7.225.000	Provinsi
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	4	Laporan	42.000.000	Kab/Kota
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi			1	Layanan	146.857.000	
	Komponen Input :						
	051	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	1	Laporan	77.999.000	Provinsi
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi	4	Laporan	68.858.000	Kab/Kota
963	Layanan Data dan Informasi			1	Layanan	165.394.000	
	Komponen Input :						
	051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	1	Laporan	93.994.000	Provinsi
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik yang tersedia	4	Laporan	71.400.000	Kab/Kota
969	Layanan Bantuan Hukum			1	Layanan	22.630.000	
	Komponen Input :						
	051	Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	Jumlah laporan advokasi pelanggaran dan pidana pemilu/pemilihan yang diselenggarakan sesuai ketentuan	1	Laporan	22.630.000	Provinsi
994	Layanan Perkantoran			1	Layanan	9.870.585.000	
	Komponen Input :						
	001	Gaji dan tunjangan	Jumlah laporan gaji dan tunjangan	5	Laporan	5.326.785.000	Prov & Kab/Kota
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	Jumlah laporan operasional dan pemeliharaan kantor	5	Laporan	4.543.800.000	Prov & Kab/Kota
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal				Unit	577.204.000	
	Indikator KRO :						
	01	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan		80	%		
951	Layanan Sarana Internal			45	Unit	353.780.000	
	Komponen Input :						
	051	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit		Provinsi
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	5	Unit	45.000.000	Provinsi
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	0	Unit	0	Provinsi
	054	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan kendaraan bermotor	0	Unit	0	Kab/Kota
	055	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	16	Unit	74.780.000	Kab/Kota
	056	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	24	Unit	234.000.000	Kab/Kota
971	Layanan Prasarana Internal			2	Unit	223.424.000	
	Komponen Input :						
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1	Unit	118.143.000	Provinsi
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Provinsi	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	0	Unit		Provinsi
	053	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan	1	Unit	105.281.000	Kab/Kota
	054	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan	0	Unit		Kab/Kota
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal				Orang	218.557.000	
	Indikator KRO :						
	01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		
954	Layanan Manajemen SDM			85	Orang	218.557.000	
	Komponen Input :						

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input	Indikator Komponen Input	Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
			4	5		
1	2	3	Satuan		6	7
	051 Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	35	Orang	109.364.000	Provinsi
	052 Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur pengawas dan sekretariat yang dilakukan pembinaan	50	Orang	109.193.000	Kab/Kota
<b>EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>			<b>Dokumen</b>	<b>517.977.000</b>	
	<b>Indikator KRO :</b>					
	01 Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota		100	%		
<b>952</b>	<b>Layanan Perencanaan dan Penganggaran</b>		<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>110.448.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	1	Dokumen	42.336.000	Provinsi
	052 Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran	4	Dokumen	68.112.000	Kab/Kota
<b>953</b>	<b>Layanan Pemantauan dan Evaluasi</b>		<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>73.981.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	1	Dokumen	33.788.000	Provinsi
	052 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program	4	Dokumen	40.193.000	Kab/Kota
<b>955</b>	<b>Layanan Manajemen Keuangan</b>		<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>183.434.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	1	Dokumen	87.566.000	Provinsi
	052 Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan	4	Dokumen	95.868.000	Kab/Kota
<b>961</b>	<b>Layanan Reformasi Kinerja</b>		<b>25</b>	<b>Dokumen</b>	<b>82.707.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, survey kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut RB	5	Dokumen	50.007.000	Provinsi
	052 Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen LHKPN/LHKASN, penyusunan dan implementasi SOP, zona integritas, survey kepuasan masyarakat, dan tindak lanjut RB	20	Dokumen	32.700.000	Kab/Kota
<b>974</b>	<b>Layanan Penyelenggaraan Kearsipan</b>		<b>5</b>	<b>Dokumen</b>	<b>67.407.000</b>	
	<b>Komponen Input :</b>					
	051 Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	1	Dokumen	35.937.000	Provinsi
	052 Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan	4	Dokumen	31.470.000	Kab/Kota
<b>TOTAL</b>					<b>15.716.117.000</b>	

